



Feminisasi Kepemimpinan atau Politik Elit? Analisis Gender terhadap Kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam Pembangunan Ekonomi Maluku Utara

Ananda Chanaya Meutya Lestari¹

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ananda Khansa Sayidina²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ika Arinia Indriyani³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Jkt No.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163

Penulis Korespondensi: (1) 6670230158@untirta.ac.id (2) 6670230140@untirta.ac.id (3)

ika.arinia@untirta.ac.id

***Abstract** analyzes the leadership of Sherly Tjoanda in regional economic development in Maluku Utara using the Feminist Political Economy perspective. In recent years, North Maluku has experienced significant economic growth driven by the expansion of the nickel industry and mineral downstream policies. The dominance of the mining sector has made extractive industries the main driver of the regional economy, but it has also created several challenges, including economic dependence on extractive sectors, potential social inequality, and unequal access to development benefits. A gender perspective is important to understand how power relations, networks of political and economic elites, and economic structures influence development policy-making. The Feminist Political Economy perspective emphasizes that the presence of women in leadership positions does not automatically produce gender transformation within political and economic systems. Therefore, economic development should be analyzed not only in terms of economic growth but also in terms of how development benefits are distributed among different social groups, including women and local communities.*

Keywords: Women's leadership, economic development, nickel industry, North Maluku

Abstrak. Analisis kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam pembangunan ekonomi di Maluku Utara dengan menggunakan perspektif *Feminist Political Economy*. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yang didorong oleh ekspansi industri nikel serta kebijakan hilirisasi mineral. Dominasi sektor pertambangan menjadikan industri ekstraktif sebagai penggerak utama perekonomian daerah, namun juga menimbulkan berbagai tantangan seperti ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif, potensi ketimpangan sosial, serta perbedaan akses terhadap manfaat pembangunan. Analisis gender menjadi penting untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan, jaringan elit politik dan ekonomi, serta struktur ekonomi memengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan. Perspektif *Feminist Political Economy* menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan tidak selalu secara otomatis menghasilkan transformasi gender dalam sistem politik dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dianalisis tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari distribusi manfaat pembangunan bagi berbagai kelompok sosial, termasuk perempuan dan masyarakat lokal.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, Pembangunan Ekonomi, Industri Nikel, Maluku Utara

LATAR BELAKANG

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan tolak ukur utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender pada sistem pemerintahan. Akan tetapi, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik di Indonesia masih terbilang minim apabila dibandingkan dengan laki-laki (Zikhali et al., 2023). Berbagai hambatan seperti

struktur politik yang maskulin, budaya patriarki, serta dominasi elit politik sering kali menghalangi perempuan untuk meraih akses ke posisi kekuasaan. Dalam situasi ini, kehadiran pemimpin perempuan di jabatan strategis menjadi hal yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dinamika gender dan struktur kekuasaan dalam ranah politik lokal.(Erikson & Josefsson, 2023)

Kajian mengenai gender dalam politik menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur kekuasaan sering kali berada dalam dilema antara upaya memperjuangkan kepentingan perempuan dengan reproduksi struktur elit yang telah ada. Penelitian mengenai perempuan dalam oligarki politik menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil memasuki struktur kekuasaan sering kali tetap berada dalam jaringan elit politik dan ekonomi yang kuat, sehingga keberadaan mereka tidak selalu menghasilkan transformasi struktural terhadap sistem politik yang patriarkal(Pullen & Vachhani, 2018). Dalam perspektif feminist political economy, relasi antara gender, kekuasaan, dan sumber daya ekonomi menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana perempuan memimpin dan mengambil keputusan dalam struktur politik.

Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan dinamika politik dan ekonomi di daerah berbasis sumber daya alam seperti Maluku Utara. Provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2025 mencapai sekitar 32–39 persen, menjadikannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh ekspansi industri pengolahan mineral dan hilirisasi nikel di kawasan industri strategis.



Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Triwulan IV 2025

(Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2026))

Dominasi sektor pertambangan dalam struktur ekonomi Maluku Utara sangat kuat. Industri pertambangan, khususnya nikel, bahkan disebut menyumbang sekitar 50 persen

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi tersebut, sementara ekspansi hilirisasi mineral menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara menjadi fenomena yang penting untuk dikaji. Ia tidak hanya merupakan salah satu pemimpin perempuan di tingkat provinsi, tetapi juga memimpin daerah dengan dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh industri ekstraktif (Deni et al., 2025). Kepemimpinannya muncul di tengah percepatan investasi industri nikel dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, namun juga diiringi dengan berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan, ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan, serta potensi dampak sosial dan lingkungan dari industri ekstraktif. (Purnamasari, 2025)

Dari perspektif studi gender, kemunculan pemimpin perempuan di daerah dengan struktur ekonomi berbasis sumber daya alam membuka ruang analisis baru mengenai bagaimana perempuan memimpin dalam konteks politik ekonomi ekstraktif (Hasanaj & Stadelmann-Steffen, 2026). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Indonesia masih memiliki variasi yang cukup besar antar wilayah, termasuk di wilayah timur Indonesia yang memiliki tingkat ketimpangan gender relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan ekonomi lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika kepemimpinan perempuan dalam politik daerah. (Barnes & O'brien, 2026)

Di sisi lain, literatur mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik seringkali menekankan konsep feminisasi kepemimpinan, yaitu gagasan bahwa perempuan membawa gaya kepemimpinan yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap isu sosial (Msofi Mgalamadzi et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, kepemimpinan perempuan dalam struktur politik yang didominasi elit ekonomi dan jaringan oligarki seringkali tidak sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai feminis tersebut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan kritis apakah kehadiran perempuan dalam posisi kekuasaan benar-benar merepresentasikan transformasi gender dalam politik, atau justru menjadi bagian dari reproduksi struktur elit yang sudah ada. (Kark & Buengeler, 2024; Nash et al., 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam pembangunan ekonomi Maluku Utara dapat dianalisis melalui perspektif gender dan politik. Penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menelaah bagaimana dinamika gender, relasi kekuasaan, dan struktur elit ekonomi berperan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian gender dan politik lokal, khususnya dalam memahami relasi antara kepemimpinan perempuan, ekonomi ekstraktif, dan struktur kekuasaan dalam pembangunan daerah.

KAJIAN TEORITIS

Teori Feminist Political Economy

1. Pengertian Feminist Political Economy

Feminist Political Economy (FPE) merupakan pendekatan teoritis yang mengkaji hubungan antara gender, kekuasaan, dan struktur ekonomi dalam proses pembangunan dan kebijakan publik. Perspektif ini muncul sebagai kritik terhadap teori ekonomi politik konvensional yang dianggap mengabaikan dimensi gender dalam analisis ekonomi dan pembangunan.

Dalam pendekatan ini, ekonomi tidak dipahami sebagai sistem yang netral terhadap gender. Sebaliknya, struktur ekonomi dan kebijakan pembangunan sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, feminist political economy menekankan bahwa analisis pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi kelompok sosial yang berbeda, termasuk perempuan.

Menurut Diane Elson, salah satu tokoh utama dalam kajian feminist political economy, kebijakan ekonomi sering kali dibangun berdasarkan asumsi bahwa aktivitas ekonomi bersifat netral gender, padahal dalam praktiknya terdapat pembagian kerja berbasis gender yang memengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan.(Elson, 1999)

2. Konsep Utama dalam Feminist Political Economy

a. Gender dan Kekuasaan dalam Struktur Ekonomi

Feminist political economy menekankan bahwa sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan sosial dan politik. Akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal, lahan, dan kesempatan kerja sering kali dipengaruhi oleh relasi gender.

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan ekonomi sering kali dirumuskan oleh elit politik dan ekonomi yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini dapat memengaruhi bagaimana manfaat pembangunan didistribusikan kepada masyarakat.

b. Ekonomi Ekstraktif dan Ketimpangan Gender

Pendekatan feminist political economy juga digunakan untuk menganalisis sektor ekonomi berbasis sumber daya alam seperti pertambangan. Industri ekstraktif sering kali didominasi oleh aktor ekonomi besar dan memiliki struktur tenaga kerja yang sangat maskulin.

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, analisis gender diperlukan untuk melihat bagaimana kebijakan ekonomi dalam sektor ekstraktif memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. (Bakker & Silvey, 2012)

c. Kepemimpinan Perempuan dalam Struktur Ekonomi

Feminist political economy juga menyoroti bagaimana perempuan yang berada dalam posisi kekuasaan menghadapi dilema antara memperjuangkan keadilan gender dan beroperasi dalam sistem ekonomi yang telah didominasi oleh elit politik dan ekonomi.

Penelitian dalam World Development menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik dapat meningkatkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Namun, efektivitas kepemimpinan perempuan juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik yang melingkupinya. (Dahlum et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis hubungan antara gender, kepemimpinan politik, dan pembangunan ekonomi daerah. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran database jurnal ilmiah dan publikasi akademik yang membahas kepemimpinan perempuan, feminist political economy, serta dinamika politik ekonomi daerah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan fenomena kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam pembangunan ekonomi di Maluku Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara gender, kekuasaan politik, dan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan sintesis berbagai literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Ekonomi dan Dominasi Industri Ekstraktif di Maluku Utara

Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Lonjakan pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh ekspansi industri nikel serta kebijakan hilirisasi mineral yang berkembang pesat di wilayah ini. Pembangunan kawasan industri pengolahan mineral dan meningkatnya investasi di sektor pertambangan telah mempercepat aktivitas ekonomi daerah secara

drastis. Industri pertambangan, khususnya nikel, memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sehingga menjadikan sektor ini sebagai motor utama perekonomian Maluku Utara (Botutihe & Paksi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh eksploitasi sumber daya alam, terutama melalui aktivitas industri ekstraktif yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan global terhadap komoditas mineral.

Dominasi sektor pertambangan dalam struktur ekonomi daerah juga menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap sektor ekstraktif (Maimunah et al., 2025). Ketergantungan ini dapat memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi daerah. Namun di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu sektor ekonomi berpotensi menimbulkan kerentanan struktural, terutama apabila terjadi fluktuasi harga komoditas global atau perubahan kebijakan industri. Selain itu, pembangunan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif juga sering kali menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, konflik sumber daya, serta tekanan terhadap lingkungan hidup di wilayah pertambangan.

Dalam perspektif *Feminist Political Economy*, struktur ekonomi yang berbasis pada industri ekstraktif tidak dapat dipahami sebagai sistem yang sepenuhnya netral terhadap relasi sosial, termasuk relasi gender. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi selalu dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan, distribusi sumber daya, serta struktur sosial yang membentuk akses masyarakat terhadap manfaat ekonomi. Industri ekstraktif seperti pertambangan umumnya memiliki karakteristik struktur tenaga kerja yang maskulin dan didominasi oleh aktor ekonomi besar, sehingga kelompok tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap keuntungan ekonomi dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara terlihat sangat tinggi secara statistik, analisis yang lebih kritis tetap diperlukan untuk melihat sejauh mana pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan distribusi kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok sosial yang lebih rentan.

Analisis Gender Terhadap Kepemimpinan Sherly Tjoanda

Hubungan antara pemerintah daerah, investor, dan perusahaan tambang menjadi faktor penting dalam membentuk arah pembangunan ekonomi di Maluku Utara (Kembauw et al., 2017). Pesatnya perkembangan industri pertambangan, khususnya sektor nikel, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam membuka ruang investasi serta menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai regulator yang menentukan kebijakan pembangunan, sementara investor dan perusahaan tambang menjadi aktor utama yang menjalankan aktivitas ekonomi melalui investasi dan pengelolaan sumber daya mineral. Interaksi antara ketiga aktor tersebut membentuk

dinamika pembangunan ekonomi daerah yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kebijakan pembangunan.

Proses pembangunan ekonomi daerah juga tidak terlepas dari peran elit politik dan elit ekonomi yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Elit politik memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan regulasi terkait investasi, sementara elit ekonomi memiliki kekuatan modal dan akses terhadap jaringan industri. Hubungan antara kedua kelompok ini sering kali membentuk jaringan kekuasaan yang dapat memengaruhi arah pembangunan daerah, terutama dalam menentukan sektor ekonomi yang diprioritaskan.

Dalam perspektif *Feminist Political Economy*, pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Kebijakan ekonomi sering kali diputuskan oleh elit politik dan ekonomi yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, analisis pembangunan perlu melihat siapa yang memiliki kekuasaan dalam mengendalikan sumber daya ekonomi serta bagaimana distribusi kekuasaan tersebut memengaruhi manfaat pembangunan bagi masyarakat secara lebih luas.

Feminisasi Kepemimpinan atau Reproduksi Politik Elit

Kemunculan kepemimpinan perempuan dalam struktur politik sering kali memunculkan harapan akan adanya perubahan dalam sistem politik yang selama ini cenderung maskulin (Wahyudi, 2018). Dalam konteks kepemimpinan Sherly Tjoanda di Maluku Utara, penting untuk melihat sejauh mana keberadaan pemimpin perempuan mampu membawa perubahan terhadap pola pengambilan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Salah satu aspek yang dapat dianalisis adalah apakah kepemimpinan perempuan mendorong pendekatan kebijakan yang lebih inklusif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas, termasuk kelompok yang selama ini kurang terakomodasi dalam proses pembangunan. Pendekatan kepemimpinan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap isu sosial sering kali diasosiasikan dengan konsep feminisasi kepemimpinan dalam studi gender.

Namun demikian, analisis terhadap kepemimpinan perempuan juga perlu melihat apakah posisi tersebut benar-benar menghasilkan transformasi dalam struktur kekuasaan politik yang ada (Nasrudin et al., 2025). Dalam beberapa konteks, pemimpin perempuan tetap harus beroperasi dalam sistem politik yang telah didominasi oleh jaringan elit politik dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa proses pengambilan kebijakan tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh aktor-aktor yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah kepemimpinan tersebut mampu membawa perubahan terhadap pola kekuasaan yang ada atau justru tetap berada dalam jaringan kekuasaan yang sama.

Dalam perspektif *Feminist Political Economy*, keberadaan perempuan dalam posisi kekuasaan tidak secara otomatis menghasilkan transformasi gender dalam sistem politik (Aprillia et al., 2026). Pendekatan ini menekankan bahwa struktur ekonomi dan politik yang telah terbentuk sebelumnya sering kali tetap memengaruhi cara pemimpin, termasuk perempuan, menjalankan perannya dalam pemerintahan. Dengan demikian, perempuan yang berada dalam posisi kekuasaan dapat saja tetap beroperasi dalam struktur oligarki politik yang telah ada, sehingga perubahan yang dihasilkan lebih bersifat terbatas dan tidak selalu mampu mengubah relasi kekuasaan secara fundamental.

Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Sosial dan Gender

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya membawa dampak pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekspansi industri pertambangan, khususnya sektor nikel, memang menciptakan peluang ekonomi baru seperti peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta terbukanya lapangan kerja. Namun demikian, manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Dalam beberapa kasus, dominasi sektor pertambangan justru berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, terutama ketika akses terhadap peluang ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki modal, keterampilan, atau jaringan ekonomi yang lebih kuat.

Selain itu, pembangunan ekonomi berbasis industri ekstraktif juga dapat memberikan dampak yang berbeda bagi kelompok sosial yang berbeda, termasuk perempuan dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Perempuan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap peluang kerja di sektor pertambangan yang cenderung didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Di sisi lain, perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat ekspansi industri juga dapat memengaruhi struktur kehidupan masyarakat lokal, termasuk perubahan pola kerja, relasi sosial, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dalam perspektif *Feminist Political Economy*, pembangunan ekonomi perlu dianalisis tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sisi distribusi manfaat serta dampaknya terhadap berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis gender untuk melihat apakah pembangunan ekonomi benar-benar memberikan manfaat yang adil dan merata, atau justru memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Dengan demikian, analisis terhadap pembangunan ekonomi di Maluku Utara perlu mempertimbangkan bagaimana distribusi manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas, termasuk perempuan dan kelompok sosial yang selama ini memiliki posisi yang lebih rentan dalam struktur ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir meningkat sangat signifikan, terutama didorong oleh ekspansi industri nikel dan kebijakan hilirisasi mineral. Dominasi sektor pertambangan menjadikan industri ekstraktif sebagai motor utama pembangunan ekonomi daerah, namun juga menimbulkan ketergantungan ekonomi serta potensi ketimpangan sosial dalam distribusi manfaat pembangunan. Dalam konteks kepemimpinan Sherly Tjoanda, keberadaan pemimpin perempuan membuka ruang analisis mengenai hubungan antara gender, kekuasaan, dan pembangunan ekonomi daerah. Meskipun kepemimpinan perempuan sering diasosiasikan dengan pendekatan yang lebih inklusif, dalam praktiknya kepemimpinan tersebut tetap beroperasi dalam struktur politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh jaringan elit. Perspektif *Feminist Political Economy* menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan, tetapi juga dengan relasi kekuasaan serta distribusi manfaat bagi berbagai kelompok sosial, termasuk perempuan.

Saran

Pemerintah daerah di Maluku Utara perlu mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif serta mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif melalui diversifikasi ekonomi daerah. Selain itu, kebijakan pembangunan sebaiknya lebih memperhatikan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal, termasuk kelompok perempuan yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan juga perlu diperkuat agar pembangunan daerah lebih responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, seperti studi lapangan atau wawancara dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika gender, kekuasaan, dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Aprillia, B., Nuradhawati, R., & Yoshida, Y. H. (2026). *Konsep Gender Dalam Ilmu Pemerintahan: Mewujudkan Pemerintahan Yang Berkeadilan Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2026, February). *Ekonomi Maluku Utara Triwulan IV-2025 Tumbuh 29,81 Persen*.
- Bakker, I., & Silvey, R. (2012). *Beyond states and markets: The challenges of social reproduction*. Routledge.

- Barnes, T. D., & O'Brien, D. Z. (2026). *Gender and Leadership in Executive Branch Politics*. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-033123>
- Botutihe, A. N., & Paksi, A. K. (2024). Dampak Strategi Investasi Nikel Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Dalam Negeri. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8(2), 178–192.
- Dahlum, S., Knutsen, C. H., & Mechkova, V. (2022). Women's political empowerment and economic growth. *World Development*, 156, 105822. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822>
- Deni, A., Wance, M., & Muhtar, M. (2025). MODERATED IDENTITY POLITICS: MUSLIM VOTERS AND RELIGIOUS DEPOLARIZATION IN NORTH MALUKU'S 2024 GUBERNATORIAL ELECTION. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(3), 302–312. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.63113>
- Elson, D. (1999). Labor markets as gendered institutions: Equality, efficiency and empowerment issues. *World Development*, 27(3), 611–627.
- Erikson, J., & Josefsson, C. (2023). Feminine Leadership Ideals and Masculine Practices: Exploring Gendered Leadership Conditions in the Swedish Parliament. *Politics and Gender*, 19(4), 1061–1086. <https://doi.org/10.1017/S1743923X23000090>
- Hasanaj, V., & Stadelmann-Steffen, I. (2026). Gendered leadership and political structures: A global analysis of crisis responses across 150 countries. *International Political Science Review*, 47(1), 75–96. <https://doi.org/10.1177/01925121241301046>
- Kark, R., & Buengeler, C. (2024). Wo~Men and Leadership: Re-Thinking the State of Research on Gender and Leadership Through Waves of Feminist Thinking. In *Journal of Leadership and Organizational Studies* (Vol. 31, Number 3, pp. 245–266). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/15480518241257105>
- Kembauw, E., Sinay, L. J., & Sahusilawane, A. M. (2017). *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Deepublish.
- Maimunah, S., Abel, M., & Setyanto, A. R. (2025). PERAN SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DI PROVINSI MALUKU UTARA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Msofi Mgalamadzi, L., Matita, M., & Chimombo, M. (2024). The gendered nature of household decision making and expenditure choices in the context of smallholder agricultural commercialization in Malawi. *CABI Agriculture and Bioscience*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s43170-024-00270-x>

- Nash, P., Pereira, T., Smout, J., Satija, S., & Ghosh, A. (2025). Women's leadership in politics and governance: understanding the potential of transformative feminist leadership. In *Gender and Development* (Vol. 33, Number 2, pp. 285–304). Routledge. <https://doi.org/10.1080/13552074.2025.2532956>
- Nasrudin, R., Solihah, R., & Aziz, Y. M. (2025). Women's Representation in Regional Elections: Gendered Institutions' Perspective on Political Design and Practice. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 6(2), 101–115.
- Pullen, A., & Vachhani, S. J. (2018). Examining the Politics of Gendered Difference in Feminine Leadership: The Absence of 'Female Masculinity.' In S. Adapa & A. Sheridan (Eds.), *Inclusive Leadership: Negotiating Gendered Spaces* (pp. 125–149). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60666-8_6
- Purnamasari, D. (2025). Political Communication and Candidate Image Construction in Regional Head Elections (Case Study of Sherly Tjoanda's Candidate in The North Maluku Governoral Elections). *Social Impact Journal*, 4(1), 83–91. <http://journal.goresearch.id/index.php/sij/index><http://journal.goresearch.id/index.php/sij/index>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Zikhali, A., Lungwengwe, L., & Komisane, S. (2023). The role of value-based leadership on local economic development: a case study of Nyandeni Local Municipality. *Insights into Regional Development*, 5(3), 24–44. [https://doi.org/10.9770/ird.2023.5.3\(2\)](https://doi.org/10.9770/ird.2023.5.3(2))